

**STRATEGI *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO)  
DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada NGO Gajahlah Kebersihan)**

**Tesis**

**Oleh:**

**AYU WULANDARI**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### **NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) STRATEGIES IN WASTE MANAGEMENT IN THE COASTAL AREA OF BANDAR LAMPUNG CITY (A Case Study on The NGO Gajahlah Kebersihan)**

**BY**

**AYU WULANDARI**

Coastal areas represent the convergence of land and sea, possessing abundant natural resource potential. However, this potential is not accompanied by community awareness to preserve it, leading to an increase in the accumulation of waste in coastal regions. The waste transportation services provided by the government have not effectively reduced the volume of household waste disposed of by coastal communities into the sea. The low awareness of the community regarding the dangers arising from the activity of waste disposal into the sea indicates the necessity of education, guidance, and empowerment for coastal communities to create a shift in mindset and behavior in managing household waste. Therefore, the local-level NGO Gajahlah Kebersihan emerges as a driver of change in creating innovative and sustainable waste management in the coastal areas of Bandar Lampung City.

This research employs a descriptive and qualitative research approach. The results show that various strategies implemented by Gajahlah Kebersihan in coastal waste management have been successful. The implementation of strategies focusing on education, environmental sustainability, and economic empowerment has been effectively implemented by maximizing the participation of various stakeholders, including the government sector, private sector, academia, media, and the community. Providing education to residents in coastal areas has the potential to alter the mindset and behavior of the community in waste management, reduce the volume of waste disposed into the environment and sea, and create alternative livelihoods for coastal communities.

*Keywords: NGO Strategies, Household Waste, Gajahlah Kebersihan, Waste Management, Coastal Area.*

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO) DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada NGO Gajahlah Kebersihan)**

**Oleh**

**AYU WULANDARI**

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang menjadi pertemuan antara daratan dan lautan yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah. Namun, potensi ini tidak disertai dengan kesadaran masyarakat untuk menjaganya yang berujung pada peningkatan jumlah timbulan sampah di kawasan pesisir. Penyediaan layanan pengangkutan sampah yang disediakan oleh pemerintah belum mampu menekan jumlah timbulan sampah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat pesisir ke laut. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas pembuangan sampah ke laut menunjukkan perlu adanya edukasi, pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dengan tujuan dapat menciptakan perubahan pola pikir dan perilaku dalam mengelola sampah rumah tangga. Oleh karena itu, NGO Gajahlah Kebersihan sebagai NGO di tingkat lokal hadir sebagai penggerak perubahan dalam menciptakan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah strategi yang dijalankan oleh Gajahlah Kebersihan dalam upaya pengelolaan sampah di kawasan pesisir telah berjalan dengan baik. Penerapan strategi yang berfokus pada aspek edukasi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi dapat terlaksana dengan baik dengan memaksimalkan partisipasi dari sejumlah stakeholder yaitu sektor pemerintah, swasta, akademisi, media dan masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, mampu mengurangi jumlah timbulan sampah yang terbuang ke lingkungan dan laut, serta menciptakan alternatif usaha bagi masyarakat pesisir.

*Kata Kunci : Strategi NGO, Sampah Rumah Tangga, Gajahlah Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Kawasan Pesisir.*

**STRATEGI *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO)  
DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada NGO Gajahlah Kebersihan)**

**Oleh:**

**AYU WULANDARI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat ntuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : STRATEGI *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO)  
DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN  
PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada NGO  
Gajahlah Kebersihan)

Nama Mahasiswa : Ayu Wulandari

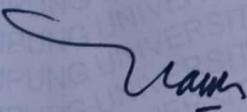
Nomor Pokok Mahasiswa : 2126061014

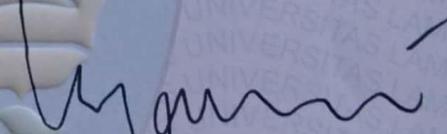
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

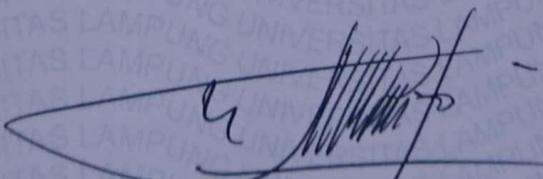
**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si**  
NIP. 196302061988031002

  
**Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si.**  
NIP. 197009142006042001

**MENGETAHUI**

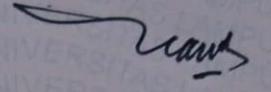
**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi**

  
**Dr. Suropto, S. Sos., M.A.B.**  
NIP. 196902261999031001

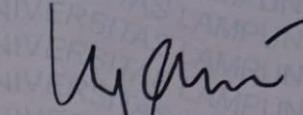
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

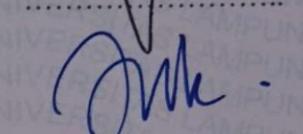
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo Sutiyo, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si.**



Penguji Utama : **Intan Fitri Meutia, S.A.N, M.A., Ph. D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **20 Desember 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Ayu Wulandari  
NPM. 2126061014

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Ayu Wulandari, lahir di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Kanti Rahayu. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Sawah Lama Bandar Lampung diselesaikan tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2009, dan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung Jurusan Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Beasiswa Penerimaan Bibit Unggul Daerah (PBUD). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Beasiswa Pascasarjana Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabbmulah engkau berharap.”*

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

*“To achieve great things, two things are needed:  
a plan and not quite enough time.”*

(Leonard Bernstein)

*“Ambillah makna dan pelajaran dari waktu yang anda alami.”*

(Ayu Wulandari)

# PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta nikmat akal pikiran kepadaku, Tesis ini kupersembahkan untuk:*

*Ibu dan Bapakku tercinta*

*Kakak dan Adikku tersayang*

*Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang dan segala doa untukku.*

*Seluruh keluarga, sanak saudara yang mendoakan dan mendukungku hingga mampu menyelesaikan studiku.*

*Teman – teman terbaikku dan seperjuanganku yang banyak membantuku.*

*Para pendidik dan Almamater tercinta*

*Universitas Lampung*

## SANWACANA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT pencipta alam semesta yang telah memberikan kebesarannya kepada penulis melalui kemudahan dan pertolongan yang tidak pernah terduga sebelumnya, serta karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **STRATEGI *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO) DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada NGO GAJAHLAH KEBERSIHAN)**. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri, namun banyak pihak yang memberikan bimbingan, motivasi, inspirasi, serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Atas segala bantuan yang diterima, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Sunarto dan Ibu Kanti Rahayu, berkat dukungan dan doa kalianlah aku bisa sampai sejauh ini. Terima kasih bapak dan ibu atas dukungan serta dorongan untuk terus melakukan yang terbaik. Doakan Ayu semoga kelak dapat membahagiakanmu hingga ke jannah-Nya.
2. Kepada kakaku Nindya Laraswati dan adikku Kania Senja Pangestu, S.M., yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya selama ini.
3. Bapak Dr. Suripto., S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan arahnya selama ini kepada penulis.
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulis. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan arahnya selama proses pendidikan hingga penyusunan tesis.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu, bimbingan, arahan, nasihat, dan dukungannya yang sudah diberikan kepada penulis selama proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.

6. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph. D. selaku dosen penguji yang telah membantu perbaikan melalui kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Terima kasih banyak ibu atas bimbingan dan arahnya kepada penulis demi perbaikan tesis ini.
  7. Kepada seluruh Dosen Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmunya yang sudah diajarkan kepada penulis.
  8. Terima kasih kepada Staff FISIP Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan.
  9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman MIA 2021. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
  10. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. Sekaligus menjadi informan peneliti dan membuka wawasan peneliti tentang strategi dalam mengelola sampah di kawasan pesisir.
  11. Teruntuk teman – teman terbaikku, Yuli Damarwati, Fitria Wulandari, Siti Sarohmawati, Laras Retno Wulandharie, (Alm) Dwi Mar'atus Sholihah. Terimakasih atas kebaikan, dukungan, dan kebersamaannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang dan ampunannya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamin..
  12. Teman – teman Putra Jogja Team, terima kasih atas pengalaman berharga selama penulis bekerja bersama. Semoga semakin sukses untuk kita semua.
- Akhir kata semoga kita semua mendapat limpahan rahmat serta hidayah dari ALLAH SWT, dan mudah-mudahan semua yang turut membantu dalam menyelesaikan Tesis ini mendapat balasan dari ALLAH SWT. Aamiin... Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2023

Penulis,

Ayu Wulandari, S.A.N.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. STRATEGI .....	10
1. Pengertian Strategi .....	10
2. Klasifikasi Strategi .....	12
B. NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGO) LINGKUNGAN .....	15
1. Pengertian NGO Lingkungan .....	15
2. Peranan NGO Lingkungan .....	17
C. PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR .....	20
1. Pengertian Sampah .....	20
2. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil .....	22
3. Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir .....	24
D. TEORI KEBERLANJUTAN ( <i>SUSTAINABILITY</i> ) .....	26
1. Definisi Keberlanjutan .....	26
2. Pilar Keberlanjutan .....	28
3. Tinjauan Tentang Ekonomi Sirkular .....	30

4. Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular .....	33
E. PENELITIAN TERDAHULU .....	34
F. KERANGKA PEMIKIRAN .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN .....	42
B. FOKUS DAN LOKUS PENELITIAN .....	43
1. Fokus Penelitian .....	43
2. Lokus Penelitian .....	44
C. JENIS DAN SUMBER DATA .....	45
1. Jenis Data .....	45
2. Sumber Data .....	45
D. INFORMAN PENELITIAN .....	46
1. Informan .....	46
2. Teknik Penentuan Informan .....	46
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	47
1. Observasi (Pengamatan) .....	47
2. Wawancara .....	48
3. Dokumentasi .....	48
4. Studi Kepustakaan .....	48
F. TEKNIK ANALISIS DATA .....	49
1. Reduksi Data .....	50
2. Penyajian Data .....	50
3. Penarikan Kesimpulan .....	50
G. TEKNIK KEABSAHAN DATA .....	50
1. Triangulasi .....	51
2. Ketekunan Pengamatan .....	51
3. Ketersediaan Referensi .....	51
4. Pemeriksaan Sejawat .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. HASIL .....	54

1. Isu Sampah di Kawasan Pesisir dan Upaya Pemerintah .....	54
2. Strategi Gajahlah Kebersihan dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir .....	65
3. Dampak Penerapan Strategi Oleh Gajahlah Kebersihan .....	112
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>120</b>
1. Isu Sampah di Kawasan Pesisir dan Upaya Pemerintah .....	120
2. Strategi Gajahlah Kebersihan dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir .....	128
3. Dampak Penerapan Strategi Oleh Gajahlah Kebersihan .....	160
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>171</b>
A. KESIMPULAN .....	171
B. SARAN .....	172
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	47
Tabel 4.1 Matriks Strategi Pengelolaan Sampah .....	166

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Ekonomi Sirkular yang dikembangkan Oleh Ellen MacArthur Foundation (2013).....	31
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1994) .....	49
Gambar 4.1 Kondisi Sampah di Pulau Pasaran Tahun 2021 .....	62
Gambar 4.2 Jembatan Akses Menuju Pulau Pasaran .....	65
Gambar 4.3 Lambang Gajahlah Kebersihan .....	66
Gambar 4.4 Riset Produksi Sampah oleh Gajahlah Kebersihan .....	71
Gambar 4. 5 Model Edukasi Lingkungan secara Offline oleh Gajahlah Kebersihan .....	77
Gambar 4.6 Edukasi Lingkungan dalam bentuk dongeng kepada anak – anak di Pulau Pasaran bersama Start Community .....	79
Gambar 4.7 Salah Satu Kampanye Eko-digital yang Dilakukan Gajahlah Kebersihan .....	83
Gambar 4.8 Contoh Kampanye Eko-digital yang Dilakukan Oleh Salah Satu Partisipan Pada Aplikasi campaign.com .....	84
Gambar 4.9 Model Ekonomi Sirkular pada Program Pasaran Wawai .....	91
Gambar 4.10 Gambar 4.14 Edukasi Pengelolaan Sampah Secara Sirkular oleh Tim Pasaran Wawai .....	92
Gambar 4.11 Tong – Tong Sampah Komunal ( <i>Communal Dropping Point</i> ) yang ada di sejumlah titik di Pulau Pasaran .....	95
Gambar 4.12 Budidaya Maggot di Rumah Inovasi Daur Ulang (RINDU) Pasaran Wawai .....	96
Gambar 4.13 Pemilahan Sampah Anorganik dan Pengumpulan Sampah <i>High Value</i> di RINDU Pasaran Wawai .....	97
Gambar 4.14 Alur pengelolaan sampah low value dan residu menjadi eco-roster di RINDU Pasaran Wawai .....	98
Gambar 4.15 Eco-Enzyme Dari Olahan Sampah Organik .....	98

Gambar 4.16 Ibu Dahlia Bersama Produk ‘Sea Mama’ Hasil Olahan Sampah Plastik .....	99
Gambar 4.17 Tas dan Kotak Tisu dari Sampah Plastik .....	116
Gambar 4.22 Kondisi Pulau Pasaran Sebelum, Saat, serta Setelah Program Pasaran Wawai .....	119

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 4.1 Skema Riset Ekososial yang digunakan oleh Gajahlah Kebersihan .....	70
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Gajahlah Kebersihan .....	105
Bagan. 4.3 Alur Pelaksanaan Strategi Riset Ekososial Gajahlah Kebersihan .....	135
Bagan 4.4 Model Sirkularitas Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran .....	148

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi manusia. Diantara banyaknya masalah lingkungan, air menjadi sektor yang memiliki keterkaitan dengan berbagai masalah lain seperti limbah, perubahan iklim, ekonomi sirkular, hingga ketahanan wilayah perkotaan (Yayasan Anak Bangsa Bisa, 2021). Akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Namun, mayoritas masyarakat di seluruh dunia masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan fasilitas sanitasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum mengalami peningkatan signifikan dalam hal sanitasi (Winters et al., 2014). Masalah kesulitan air bersih dan sanitasi yang layak ini juga dialami oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Sebagai negara kepulauan, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir (Durand, 2012). Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang berakibat fatal yang ditularkan melalui air. Salah satu bentuk penyebaran penyakit melalui air ialah limbah yang tidak terkelola yang masuk ke sungai dan lautan sehingga menyebabkan pencemaran ekosistem laut (Löhr et al., 2017). Begitu krusialnya masalah air ini, kemudian menjadikan United Nation Development Program (UNDP) memasukkannya kedalam dua agenda penting dari Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada poin ke 6 'Air Bersih dan Sanitasi Layak' dan poin ke 14 'Ekosistem Laut' (Bappenas, 2022).

Air, sanitasi, sampah laut, dan kawasan pesisir, semuanya memiliki keterkaitan. Salah satu akar dari masalah air bersih ialah sampah (Jambeck, et.al., 2015). Menurut laporan hasil pemantauan sampah laut Indonesia yang

dilakukan oleh Direktorat Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sekitar 80% sampah laut berasal dari daratan (Sahar et al., 2020).

Jumlah sampah yang tidak dikelola dengan baik yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir di satu negara berkisar antara 1,1 juta hingga 8,8 juta ton per tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya dapat masuk ke laut melalui saluran air daratan, aliran air limbah, dan diangkut oleh angin atau air pasang (Jambeck, et.al., 2015). Padahal lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia memperoleh pendapatan dan mata pencaharian dengan bergantung pada sumber daya pesisir dan laut (OECD, 2023). Sampah yang mengendap di kawasan pesisir dan laut, juga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan peningkatan biaya bagi pengguna laut dan masyarakat pesisir. (García-Hermosa & Woodall, 2023); (Schuyler et al., 2018).

Sampah di laut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan. Sampah, khususnya sampah plastik, yang mengendap dan tidak dapat terurai di laut mengakibatkan terkontaminasinya biota dan sumber daya laut lainnya sehingga mengandung plastik berukuran mikro dan nano (Ayun, 2019; Putra, 2019). Pencemaran laut dan kawasan pesisir juga dapat berasal dari berbagai sumber selain dari daratan, misalnya aktivitas dasar laut, pembuangan limbah (dumping), pencemaran dari kapal laut, serta pencemaran dari dan/atau melalui atmosfer (Sahar et al., 2020). Mayoritas timbunan sampah merupakan sampah domestik yang terdiri dari berbagai macam sampah, seperti misalnya sampah residu atau sampah plastik yang sulit terurai (Hetherington, et al (2005) dalam (Sahar et al., 2020).

Kekayaan sumber daya yang terletak di pesisir dan pulau – pulau kecil sangat beragam mulai dari sumber daya hayati maupun non-hayati, sumber daya buatan, serta jasa – jasa lingkungan. Kawasan pesisir termasuk pulau – pulau kecil disekitarnya memerlukan pengelolaan khusus mengingat potensi

kekayaan sumber daya laut serta ekosistem laut yang ada. Pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam regulasi terkait pengelolaan sampah, sejauh ini telah berupaya dalam mengatasi permasalahan sampah laut dan kawasan pesisir dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Namun, hingga saat ini, penumpukan sampah disekitar kawasan pesisir masih menjadi masalah utama dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun (Rahman, et.al, 2022).

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera juga tidak terlepas dari polemik pengelolaan sampah di kawasan pesisir. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya juga menyebabkan masalah lain terkait ketersediaan lahan yang terus berkurang akibat adanya konversi lahan, terutama untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Hal tersebut juga diperparah dengan karakteristik Kota Bandar Lampung yang pusat perkotaannya berada di wilayah pesisir dan padat penduduk dengan tingkat kerentanan dampak perubahan iklim cukup tinggi (Mukhlis et al, 2011 dalam Ilmi et al., 2020). Selain menyebabkan berbagai masalah ekologi dan sosial-ekonomi, sampah laut juga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan manusia, khususnya perikanan, warisan budaya, dan rekreasi (Beaumont et al., 2019).

Pulau Pasaran merupakan salah satu kawasan pesisir yang berbentuk pulau yang terletak di bagian timur Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Pulau Pasaran telah dikenal sejak lama sebagai sentra penghasil ikan teri di Provinsi Lampung. Polemik permasalahan sampah juga turut dialami oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Pasaran. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan pada tahun 2021, produksi sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat Pulau Pasaran mencapai 2.864 kg per minggu. Menurut Dicky Dwi Alfandy selaku *Sustainable Director* Gajahlah Kebersihan, pola hidup masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir seperti membuang sampah ke laut, praktik pembakaran dan penimbunan sampah, menunjukkan 90% masyarakat pesisir belum mengelola sampah dengan baik

menjadi penyebab dari meningkatnya volume sampah di kawasan pesisir. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sebab mempengaruhi akses air bersih serta sanitasi di kawasan pemukiman penduduk yang tinggal di kawasan pesisir. Selain itu, laut yang tercemar mengakibatkan peningkatan biaya transportasi bagi para nelayan, sebab harus mencari ikan lebih jauh dari daratan pesisir. (wawancara 15 Juli 2023).

Menurut Bambang Heriyanto selaku Lurah Kota Karang menyebutkan, sejatinya pemerintah di tingkat kelurahan telah berupaya untuk menyediakan layanan pengangkutan sampah yang memadai, termasuk di kawasan Pulau Pasaran, untuk kemudian diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) terdekat yakni TPS Cungkeng. Namun, upaya tersebut terkendala oleh beberapa hal seperti: (i) Banyaknya jumlah timbulan sampah yang terdapat di muara kawasan pesisir yang mayoritas merupakan sampah kiriman dari sungai/daratan; (ii) Keterbatasan sarana dan prasarana berupa armada pengangkutan sampah atau kendaraan roda tiga (tricycle) untuk mengangkut sampah yang hanya berjumlah 3 (tiga) unit dengan cakupan wilayah sampah yang harus diangkut sebanyak 22 RT (Rukun Tetangga), dan (iii) Keterbatasan anggaran untuk peningkatan jumlah sarana prasarana yang mengalami pengurangan sebagai imbas dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 (Wawancara 29 September 2023).

Menurut Solbintaron selaku Kepala UPT Persampahan Kecamatan Teluk Betung Timur menambahkan, upaya pengelolaan sampah di kawasan pesisir sendiri lebih berfokus pada penanganan dan pengangkutan sampah berdasarkan sumber sampah yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, terutama di jalan – jalan protokol saja. Sebagai penyedia layanan pengangkutan sampah di tingkat kota, UPT Persampahan Kecamatan Teluk Betung Timur juga mengalami kendala yang sama dengan pemerintah Kelurahan Kota Karang yakni keterbatasan armada pengangkutan sampah berupa dump truk. Pihak UPT Persampahan Teluk Betung Timur juga telah mengajukan penambahan unit armada pengangkutan sampah, namun masalah

keterbatasan anggaran kembali menjadi kendala yang cukup berpengaruh dalam upaya meningkatkan layanan pengangkutan sampah (Wawancara 28 Oktober 2023).

Pada tingkat provinsi, menurut Achmad Jon Viktor selaku Kasi Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung menjelaskan, hingga kuartal ketiga tahun 2023, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani masalah sampah ialah berupa penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA). (Wawancara 24 Oktober 2023).

Menurut Budiman P. Mega selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyebutkan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ialah dengan membangun TPS dan bekerjasama dengan aparat pamong kelurahan maupun kecamatan setempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak yang dapat ditimbulkan jika sampah tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi, hal tersebut perlu diiringi dengan adanya inovasi yang berkelanjutan (*sustainable*) yang mampu melibatkan pihak ketiga untuk dapat memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi secara sadar dalam upaya pengelolaan sampah<sup>1</sup>.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 Bagian Ketiga Strategi Pasal 9 Butir 1 poin F disebutkan bahwa dalam rangka pemulihan degradasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, maka diperlukan strategi pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Berkaitan dengan hal

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Sosialisasi Peluncuran Proyek Pasaran Wawai pada 12 September 2022, diakses melalui akun resmi kanal Youtube Yayasan Anak Bangsa Bisa berikut <https://www.youtube.com/watch?v=Wd1Ydp-1Co>.

tersebut, keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dalam hal ini diwakili oleh organisasi nirlaba atau juga dikenal dengan istilah *Non-Governmental Organization* (NGO). Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah sampah termasuk menciptakan inovasi pengelolaan sampah, khususnya di kawasan pesisir laut, menarik perhatian untuk dapat berkontribusi di masyarakat dalam mengatasi isu sampah laut (*marine debris*). NGO dan masyarakat dapat berfungsi sebagai penyeimbang (*sense of balance and controlling*) dari program pembangunan yang dijalankan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan konsep yang berorientasi pada masyarakat (*people oriented*), partisipatoris, dan berkelanjutan (*sustainable*) (Hadi, 2014).

Menurut (Koteen, 1997) krisis yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara individu atau institusi yang terpisah. Pemerintah tidak harus selalu menjadi pemrakarsa, namun dapat bertindak sebagai mitra kolaboratif, sehingga pemerintahan yang baik, yang lebih dekat dan tanggap terhadap rakyat dapat terwujud. Kehadiran NGO atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), memainkan peranan penting dalam menciptakan inovasi pengelolaan sampah berupa program maupun kegiatan yang bersifat terus menerus atau berkelanjutan, yang diharapkan lebih mampu menjangkau masyarakat setempat (Surya, 2018).

Salah satu NGO di tingkat lokal yang memiliki fokus terhadap isu pencemaran laut dan kawasan pesisir ialah Gajahlah Kebersihan. Gajahlah Kebersihan merupakan organisasi nirlaba atau NGO yang berfokus pada edukasi lingkungan, khususnya isu sampah laut. Gajahlah Kebersihan didirikan pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 resmi berdiri sebagai NGO dengan nama Yayasan Inovasi Sosial Berkelanjutan<sup>2</sup>. Gajahlah Kebersihan didirikan untuk menjadi tempat atau wadah yang mampu memberdayakan pemuda untuk

---

<sup>2</sup> Dibuktikan dengan Akta Yayasan berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008632.AH.01.04.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Inovasi Sosial Berkelanjutan.

menjadi pemimpin dalam konservasi lingkungan, terutama dalam isu sampah laut.

Pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan strategi yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat secara terus menerus bagi masyarakat (Jayantri & Ridlo, 2022). Dalam upaya pengelolaan sampah di kawasan pesisir, sejalan dengan pemerintah, Gajahlah Kebersihan saat ini berfokus pada upaya pengelolaan sampah yang bersumber dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Hal ini dikarenakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan, sampah yang dihasilkan dari rumah tangga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir lebih terstruktur dan memiliki batasan wilayah yang cukup jelas, serta lebih memungkinkan untuk dikelola (Gajahlah Kebersihan, 2022).

Berdasarkan serangkaian uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan strategi serta dampak dari penerapan strategi yang berkelanjutan yang dilakukan Gajahlah Kebersihan dalam upaya pengelolaan sampah di kawasan pesisir dengan menggunakan pendekatan strategi menurut John Koteen (1997) yang terdiri dari: (1) *corporate strategy* (strategi organisasi), (2) *program strategy* (strategi program), (3) *resources support strategy* (strategi sumber daya pendukung), dan (4) *institutional strategy* (strategi kelembagaan). Dengan mengetahui strategi yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan melalui pendekatan strategi menurut Koteen (1997), maka kemudian dapat diketahui dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari penerapan strategi – strategi tersebut dalam upaya mengatasi isu sampah di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan strategi Gajahlah Kebersihan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah dampak dari penerapan strategi Gajahlah Kebersihan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan bagia masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang hendak didapatkan terhadap permasalahan tersebut diatas adalah dapat mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses penerapan serta dampak dari penerapan strategi yang dilakukan Gajahlah Kebersihan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi dan menjadi bahan referensi untuk menambah khasanah keilmuan Manajemen Strategis yang berfokus pada kajian strategi organisasi non pemerintah atau NGO (*Non Governemental Organization*).
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Gajahlah Kebersihan  
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Gajahlah Kebersihan dalam upaya menciptakan inovasi pengelolaan sampah di kawasan pesisir yang berkelanjutan.
  - b) Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung  
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam

upaya meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, baik di tingkat Kota Bandar Lampung maupun di tingkat Provinsi Lampung.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya bagi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. STRATEGI**

#### **1. Pengertian Strategi**

Setiap organisasi, baik itu bisnis maupun non-profit seperti NGO, memerlukan strategi untuk mencapai tujuan dan visi mereka. (Higgins, 1985) menjelaskan bahwa strategi juga membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan tepat, menghindari risiko yang tidak perlu, dan mengoptimalkan keuntungan. Dengan strategi yang jelas, organisasi dapat fokus pada tujuan jangka panjang dan mencegah terjebak dalam taktik yang tidak efektif.

Strategi membantu organisasi untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana mereka dapat mencapai tujuan mereka melalui pengaturan skala prioritas, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana tindakan yang efektif. Organisasi non-profit terutama NGO di tingkat lokal sangat membutuhkan strategi organisasi karena mereka bergantung pada dukungan masyarakat dan donor untuk menjalankan program-program mereka. Selain itu, strategi organisasi juga membantu NGO dalam mengelola risiko dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan adanya strategi yang jelas, NGO dapat mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi serta bagaimana mereka harus menangani situasi tersebut.

NGO lingkungan merupakan organisasi yang mendedikasikan dirinya untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan (sustainability). Peran NGO tidak bisa dipandang sebelah mata dan patut untuk terus mendapatkan perhatian dalam bidang keilmuan, termasuk kontribusi NGO dalam isu lingkungan yang berkaitan dengan

keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Untuk mencapai tujuan organisasi, NGO lingkungan menggunakan berbagai strategi yang disesuaikan dengan visi misi organisasi dan tujuan dari berdirinya NGO lingkungan tersebut.

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani 'strategos' yang berarti jenderal. Dalam pengertian militer, strategi melibatkan perencanaan dan pengarahan pertempuran atau kampanye dalam skala besar, yaitu tanggung jawab jenderal. Dalam konteks ini, strategi dibedakan dari taktik, yang melibatkan inisiasi tindakan untuk mencapai tujuan yang lebih cepat. Dalam pengertian yang lebih mendasar, istilah ini menunjukkan keterkaitan dengan proses penetapan tujuan, perumusan tujuan yang lebih mendesak, dan pemilihan tindakan spesifik yang diperlukan dalam penerapan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (Steiss, 2003).

Strategi didefinisikan oleh (Salusu, 2004) sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Menurut (Parameswari, 2016), dalam kerjanya, NGO sering menggunakan strategi bumerang dalam jejaringnya di kancah domestik maupun internasional dan berupaya menekan negara dari berbagai arah. Sedangkan pada tahap formulasi kebijakan, NGO berperan sebagai pihak yang meyakinkan pemerintah atau negara beserta organisasi lainnya untuk merubah kebijakan mereka terhadap suatu isu.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari proses penetapan dan perumusan tujuan hingga pemilihan tindakan yang lebih spesifik dalam kondisi yang paling menguntungkan.

## 2. Klasifikasi Strategi

Dan Schendel dan Charles Hofer seperti yang dikutip (Salusu, 2004) dalam (Higgins, 1985) menjelaskan klasifikasi strategi organisasi yang dibagi kedalam empat tingkatan yang dikenal dengan *Master Strategy*, diantaranya sebagai berikut:

### (1) *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok kepentingan yaitu pemerintah dan kelompok lainnya seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Masing - masing kelompok memiliki kepentingan dan tuntutan yang bervariasi terhadap organisasi. Jadi, dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Respon terhadap keinginan masyarakat perlu diberi perhatian dengan pertimbangan - pertimbangan etis

### (2) *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering dikenal dengan istilah *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu tidak hanya ditujukan oleh organisasi bisnis saja, melainkan juga oleh setiap organisasi baik pemerintah maupun non profit.

### (3) *Business Strategy*

Dalam istilah bisnis, strategi ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat agar memperoleh keuntungan - keuntungan stratejik yang sekaligus menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Sebagaimana namanya, strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif yang untuk kalangan non profit lebih disukai menggunakan istilah keunggulan komparatif. "Lakukanlah apa yang orang lain tidak atau belum laksanakan. Atau kerjakanlah lebih baik dan lebih sempurna daripada yang orang lain laksanakan."

(4) *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung untuk menunjang suksesnya strategi lain. Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (1990) dan Salusu (2004) mengenal dan membaginya kedalam tiga tingkatan strategi saja yakni *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*. *Enterprise strategy* dianggap sudah masuk di dalam *corporate strategy*. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu (i) strategi fungsional ekonomi; (ii) strategi fungsional manajemen; dan (iii) strategi isu stratejik.

Sedikit berbeda dengan Higgins, Wheelen dan Hunger yang membagi tipe - tipe strategi ke dalam tingkatan - tingkatan strategi, (Koteen, 1997) dalam (Salusu, 2004) membagi strategi organisasi ke dalam empat tipe strategi, diantaranya ialah:

(a) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai - nilai, dan inisiatif - inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan - pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

(b) *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi - implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira - kira dampaknya apabila program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

(c) *Resources Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber - sumber esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan lain sebagainya.

(d) *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif - inisiatif stratejik.

Dalam sejumlah literatur, tidak disebutkan secara spesifik klasifikasi ataupun tipe strategi NGO lingkungan dalam upaya menyelesaikan masalah lingkungan. Mayoritas NGO lingkungan cenderung melakukan gerakan atau aksi yang langsung melibatkan kontribusi ataupun partisipasi masyarakat di dalam program mereka seperti advokasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. (Tamam, 2018) menambahkan, terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam membagi strategi ke dalam beberapa kategori, maka cukup menunjukkan bahwa strategi organisasi tidak hanya satu. Tipe – tipe strategi tersebut saling menopang sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh yang mampu menjadikan organisasi sebagai suatu lembaga yang kokoh pula, dan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu.

Penelitian ini akan lebih banyak membahas tentang strategi program, mengingat bahwa NGO umumnya lebih banyak berfokus pada eksekusi program yang mampu memberikan dampak bagi sasaran dan tujuan organisasi. Menurut Alan Walter Steiss, program merupakan elemen dalam keputusan stratejik yang ditawarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Steiss, 2003). Menurut (Berman, 1998) program didefinisikan sebagai sekumpulan sumber daya, yang diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan umum, di bawah arahan seorang manajer program. Menurut (Bayu, 2021) Program adalah kumpulan kegiatan–kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Berdasarkan penjelasan klasifikasi beberapa strategi diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan strategi yang dikemukakan oleh Koteen (1997) yang terdiri dari empat tipe strategi yaitu: (1) *corporate strategy* (strategi organisasi), (2) *program strategy* (strategi program), (3) *resources support*

*strategy* (strategi pendukung sumber daya), dan (4) *institutional strategy* (strategi kelembagaan). Hal ini mengarah pada NGO yang cenderung lebih berfokus pada implikasi - implikasi stratejik dari suatu program yang ditujukan untuk menyelesaikan lingkungan yang menjadi sasaran organisasi. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada strategi program yang dimiliki oleh Gajahlah Kebersihan dalam menangani masalah sampah di kawasan pesisir.

## **B. *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS* (NGO) LINGKUNGAN**

### **1. Pengertian NGO Lingkungan**

Dalam peraturan pemerintah, seiring dengan perkembangannya, istilah organisasi kemasyarakatan (ormas) digunakan untuk menerjemahkan penggunaan istilah NGO. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mendefinisikan Ormas sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Peter Hannan (1988), seorang pakar ilmu - ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM/ NGO di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM/ NGO merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat grassroot (akar rumput), biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok - kelompok swadaya lokal. Serrano (1994) dalam (Anggara, 2009) mengemukakan bahwa NGO merupakan institusi baru di dunia barat yang muncul sekitar tahun 1950-1960 dan pada awalnya mengurus bantuan kerdermawanan. (Lewis, 2009) menambahkan, bagi sebagian orang, NGO dianggap sebagai aktor yang berguna di tengah masyarakat sebab NGO mampu menyediakan layanan yang hemat biaya dengan cara yang fleksibel (dan lebih mudah dijangkau masyarakat), dan bagi sebagian yang

lain, NGO merupakan juru kampanye yang memperjuangkan perubahan atau menghasilkan ide dan pendekatan baru untuk masalah pembangunan.

Meskipun sebenarnya isu lingkungan telah masuk sejak tahun 1970-an, namun sejumlah NGO di Indonesia baru mulai menyadari adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang semakin parah, pada tahun 1980 dengan berdirinya Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) sebagai forum komunikasi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki concern di bidang lingkungan hidup dan menjadikan isu lingkungan mendapatkan posisi yang lebih kuat sebagai isu strategis (Suharko, 1998).

Suharko (1998) mendefinisikan NGO lingkungan sebagai NGO yang memiliki concern dan program untuk mengatasi masalah - masalah lingkungan. International Union for Conservation of Nature (2003) mendefinisikan NGO lingkungan/ ENGOs sebagai Organisasi non profit, yang berisikan sekelompok sukarelawan yang berasal dari masyarakat yang dikelola pada tingkat lokal, nasional, atau internasional yang ditujukan untuk mengatasi isu - isu lingkungan. World Bank (2019) menjelaskan NGO lingkungan merupakan organisasi non pemerintah yang berdedikasi untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan sustainability.

ENGOs biasanya bersifat independen (tidak dikendalikan oleh pemerintah), meskipun mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan mereka. ENGOs sering didanai oleh pihak pendonor (pemberi sumbangan dana) baik dari individu, yayasan, dan bisnis, dan mereka juga dapat menerima hibah dan kontrak dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional (Suharko, 1998)

Gareth dan Brown (1991) dalam (Parameswari, 2016) menjelaskan bahwa dalam mengatasi isu lingkungan, tiap aktor baik aktor negara maupun aktor non negara memiliki peranan yang signifikan, tidak terkecuali NGO serta pelaku bisnis. Diperlukan adanya kesinambungan kerja antar satu aktor dengan aktor lainnya sehingga mampu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi isu lingkungan demi kepentingan bersama.

Menurut (Koteen, 1997) krisis yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara individu atau institusi yang terpisah. Pemerintah tidak harus selalu menjadi pemrakarsa, namun dapat bertindak sebagai mitra kolaboratif, sehingga 'good governance' atau pemerintahan yang baik, yang lebih dekat dan tanggap terhadap rakyat dapat terwujud. NGO lingkungan dapat memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah lingkungan, karena mampu mengakomodir suara masyarakat dan komunitas yang peduli terhadap lingkungan, mempromosikan praktik *sustainability*, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan/atau perusahaan atas tindakan yang mereka lakukan yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan serangkaian definisi diatas, NGO lingkungan (ENGOS) adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu - isu lingkungan.

## **2. Peranan NGO Lingkungan**

Pembagian peranan LSM di Indonesia pada dasarnya muncul agar para LSM memiliki keterlibatan dalam pembangunan secara bersama, alih-alih menciptakan konflik sosial diantara kelompok - kelompok yang memiliki kepentingan maupun kelas - kelas ekonomi yang berbeda (Anggara,

2009). (Gaffar, 2000) kemudian mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat diberikan oleh NGO / LSM, yaitu :

- 1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput (*grassroots*) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga - lembaga internasional lainnya;
- 3) Ikut ambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Adi Sasono (2002) dalam (Anggara, 2009), yang menjelaskan tiga peranan dari NGO, diantaranya :

- (a) Advokasi kebijakan terhadap negara;
- (b) Mengupayakan agar sektor swasta mengembangkan kemitraan sosial; dan
- (c) Mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok - kelompok *civil society* dan masyarakat pada umumnya, juga produktivitas dan kemandirian mereka.

Sedikit berbeda dengan pendapat diatas, (Sulistio, 2020) mengklasifikasikan NGO ke dalam tiga peranan, yaitu :

- (1) *Implementer*  
NGO dengan peran *implementer* atau pelaksana yang berfokus pada pemberian jasa dan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (2) *Catalyst*  
NGO dengan peran *catalyst* dapat diidentifikasi dari kemampuan NGO dalam memelopori pemikiran serta gagasan mengenai perubahan sosial.
- (3) *Partner*

NGO sebagai *partner* merefleksikan hubungan kerjasama antara NGO dengan pemerintah, lembaga pendonor, atau lembaga – lembaga swasta. NGO dan lembaga – lembaga ini mengadakan program – program yang memiliki tujuan sosial bagi masyarakat.

Dari penjabaran terkait peranan NGO diatas, Gajahlah Kebersihan memiliki peranan sebagai *catalyst* atau pelopor perubahan (Sulistio, 2020) untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat di tingkat *grassroots* (Gaffar, 2000) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok *civil society* dan masyarakat umum termasuk pada segi produktivitas dan kemandirian. Hal ini sangat esensial sebab mampu menggerakkan masyarakat dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain peranan di masyarakat, pada klasifikasi NGO di dunia Barat pada era awal berkembangnya NGO. (Anggara, 2009) mengklasifikan NGO kedalam 2 jenis, diantaranya :

(1) Pertama, NGO yang berorientasi pada aksi atau program.

NGO dalam kategori ini menjalankan program karena keprihatinan mereka terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti isu Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, perdamaian, keadilan, dan lain – lain.

(2) Kedua, NGO yang berfungsi sebagai lembaga donor.

Pada kategori ini, NGO memiliki fungsi sebagai lembaga pendonor khusus dalam menyalurkan bantuan dana kepada NGO di Dunia Ketiga. Upaya ini dilakukan dengan menghimpun dana dari usaha – usaha swadaya masyarakat, donatur perorangan, usaha komersial, maupun dari alokasi dana bantuan kerja sama pembangunan internasional pemerintah yang kemudin disalurkan ke NGO yang bersangkutan.

Gajahlah Kebersihan selaku NGO di tingkat lokal masuk dalam kategori pertama. Salah satu kendala umum yang sering dijumpai pada NGO di tingkat lokal dalam menjalankan sebuah program ialah pendanaan. Tidak hanya pemerintah yang memiliki dalih keterbatasan dana ketika sebuah program tidak berjalan secara maksimal, NGO juga memiliki masalah yang sama, sebab NGO merupakan organisasi sosial yang umumnya bersifat sukarela. NGO lokal umumnya memiliki kendala dalam pendanaan sehingga dalam menjalankan sebuah program seringkali bergantung pada lembaga donor yang masuk dalam kategori kedua.

## **C. PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR**

### **1. Pengertian Sampah**

Dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses lain yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut Environment Protection Authority (EPA) South Australia (2019), Sampah (waste) adalah segala sesuatu yang dibuang, ditolak, ditinggalkan, tidak diinginkan, atau kelebihan, baik yang dimaksudkan untuk dijual atau untuk didaur ulang, diproses ulang, dipulihkan, atau dimurnikan oleh operasi terpisah dari operasi yang menghasilkan bahan tersebut.

Menurut McDougall (2001) dalam (Mahyudin, 2016), sampah merupakan sesuatu yang kurang berguna atau berniali, atau sisa – sisa yang tidak berguna. Sampah merupakan produk dari aktivitas manusia yang secara fisik terdiri atas material yang sama dengan barang yang berguna, hanya dibedakan dari kurangnya nilai. Sebab kurangnya nilai atau kegunaan

dapat dihubungkan dengan tercampurnya sampah dan komposisi sampah yang tidak diketahui.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, terdapat kesamaan definisi sampah secara umum, yaitu sampah merupakan material atau segala sesuatu yang dibuang yang dianggap sudah berkurang nilai kegunaannya

Sedikit berbeda dengan beberapa definisi diatas, McDonough dan Braungart (2002) dalam (Mahyudin, 2016) menganggap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang sama dengan makanan. (Mahyudin, 2016) menambahkan, agar memiliki nilai tambah, sampah harus dikelola kembali sehingga dapat dipakai kembali dan tidak mencemari lingkungan.

Berdasarkan jenisnya, (Suharjo (2002); Ratnasari (2019); Islami (2022)) membagi sampah berdasarkan tiga golongan, yaitu :

(a) Sampah organik

Yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibedakan menjadi sampah organik basah dan kering. Sampah organik basah adalah sampah yang memiliki kandungan air cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sedangkan, sampah organik kering merupakan sampah organik yang memiliki kandungan air rendah atau sedikit seperti dedaunan kering, ranting pohon, kayu dan kertas. Sampah organik dapat membusuk dan hancur (terdegradasi) secara alami.

(b) Sampah anorganik

Yaitu sampah yang tidak dapat hancur (degradasi) secara alami, yang dihasilkan dari bahan – bahan non hayati, baik itu berupa bahan sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau yang berasal dari sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam seperti sampah plastik, karet, logam, kaleng, dan kaca.

(c) Sampah berbahaya atau limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Yaitu bahan limbah yang beracun karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan sumbernya, Menurut Gajahlah Kebersihan (2023), sampah, yang pada akhirnya bermuara ke laut, dapat berasal dari 3 sumber, diantaranya :

- 1) Dari daratan atau sungai, yaitu sampah yang dihasilkan dari aktivitas di daratan seperti rumah tangga masyarakat perkotaan, pasar, kawasan industri, dan sebagainya, yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja ke sungai yang kemudian mengalir menuju ke laut.
- 2) Rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan laut yang kemudian membuang sampah ke lautan.
- 3) Laut, yaitu sampah yang dihasilkan oleh aktivitas di lautan termasuk bangkai kapal, jangkar, dan sejenisnya.

Sampah yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang berasal masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir sebagaimana yang telah dikemukakan menurut Gajahlah Kebersihan (2022) dengan klasifikasi sampah yang dikemukakan oleh (Suharjo (2002); Ratnasari (2019); Islami (2022)) yaitu sampah organik, sampah anorganik, serta limbah B3.

## **2. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil**

Wilayah atau kawasan pesisir merupakan daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi perubahan di darat dan di laut. Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil disebutkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian atas sumber daya yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil melalui skema antarsektor, antara pemerintah dan

pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Berciri Kepulauan, Bagian Kesatu, Kewenangan Daerah Provinsi di Laut pada Pasal 27 yang berbunyi :

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Adapun cakupan kewenangan yang dimaksud diantaranya ialah terkait pemanfaatan kekayaan laut hingga 12 mil dari garis pantai, termasuk penataan ruang dan administratif, serta turut memelihara keamanan di laut dan mempertahankan kedaulatan negara.

### 3. Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki sumber daya potensial (Patuwo et al., 2020) dikarenakan berfungsi sebagai titik persilangan antara air dan daratan (Harefa et al., 2022). Potensi ini semakin besar bagi Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, bahkan menjadikan kawasan pesisir sebagai salah satu objek wisata utama di Indonesia (Darwati, 2019). Akan tetapi, potensi besar kawasan pesisir ini semakin terancam dalam dua dekade terakhir (Hetherington et al., 2005). Hal ini disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan yang terjadi di laut serta kawasan pesisir yang berasal dari kegiatan yang ada di darat dan di laut. Timbulan sampah di laut menyebabkan laut tercemar dan merusak ekosistem laut serta kawasan pesisir dengan keanekaragaman hayati di dalamnya, serta berpotensi membahayakan kesehatan manusia (Convention of Biological Diversity, 2012; Crepy & Porteron, 2021; Marlina, 2013; Suryono, 2019).

Sampah, terutama sampah plastik, yang dibuang ke laut dan mencemari kawasan laut dan pesisir menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dikarenakan secara persentase menempati posisi pertama sebagai penyumbang sampah terbanyak sejak riset tentang pencemaran laut dilakukan pada tahun 1997 hingga saat ini (Afivah et al., 2020; Chotimah et al., 2022; Convention of Biological Diversity, 2012; Darwati, 2019; Ilmi et al., 2020; Jayantri & Ridlo, 2022; Naf'an et al., 2020; Ningsih et al., 2020; Patuwo et al., 2020; Sahar et al., 2020; Suryono, 2019; Wahyudin & Afriansyah, 2020) bahkan mencapai 150 juta ton telah terakumulasi di laut (Crepy & Porteron, 2021). Jika tidak ditangani dengan baik, kebocoran sampah akan terus menyebar. Kebocoran sampah dari daratan yang masuk ke laut membawa dampak bagi kawasan pesisir tidak hanya di sektor ekonomi, namun juga pariwisata, kehidupan biota laut, ekosistem pesisir, dan kesehatan manusia (ESCAP, 2022). Mikroplastik yang termakan oleh biota laut seperti plankton atau ikan dapat mengganggu produktivitas perikanan menjadi menurun dan bisa masuk ke rantai makanan yang

akhirnya dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.

Pengelolaan sampah menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dalam pasal 19 dan 20 UU No.18 Tahun 2008 tertulis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dapat dilakukan melalui dua skema yaitu dengan: (i) melakukan pengurangan sampah; dan (ii) penanganan sampah. (Arumsari, et.al., 2017) menambahkan skema pengelolaan sampah rumah tangga dengan beberapa urutan diantaranya : (1) pengurangan sampah; (2) daur ulang sampah; dan (3) pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian untuk penanganan sampah dapat melalui kegiatan : (a) pemilahan, (b) pengumpulan, (c) pengangkutan, (d) pengolahan, dan (e) pemrosesan akhir. Hal ini merujuk pada Pasal 22 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berisi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 Bagian Ketiga Strategi Pasal 9 Butir 1 poin F disebutkan bahwa dalam rangka pemulihan degradasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, maka diperlukan strategi pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Pengelolaan kawasan pesisir yang benar dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan daya tarik kawasan pesisir, serta dapat menambah pendapatan bagi warga setempat maupun masyarakat sekitarnya.

## **D. TEORI *KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY)***

### **1. Definisi Keberlanjutan**

Teori keberlanjutan (*sustainability*) pertama kali dikemukakan oleh Meadows, et. al. pada tahun 1972, Meadows mengemukakan bahwa upaya masyarakat untuk memprioritaskan respon sosial terhadap masalah lingkungan dan ekonomi. WCED (1987) menambahkan bahwa respon sosial ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masa kini dan generasi masa depan (Sari, 2016)

Secara harfiah, keberlanjutan merupakan kemampuan untuk mempertahankan suatu entitas, hasil, atau proses dari waktu ke waktu. Pertanian, pengelolaan hutan, atau investasi keuangan dapat dianggap berkelanjutan jika kegiatan tersebut tidak menghabiskan sumber daya material yang menjadi sandarannya. Dalam penggunaannya yang semakin

umum, konsep keberlanjutan membingkai cara-cara dimana masalah lingkungan mengancam kondisi sistem ekonomi, ekologi, dan sosial yang sehat (Jenkins, 2010)

Pada tingkat lokal maupun global, keberlanjutan mengarahkan perhatian praktis pada timbal balik yang kompleks antara sistem manusia dan ekologi. Keberlanjutan merupakan konsep yang inklusif dan ambigu karena membawa ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan hidup ke dalam hubungan moral dengan sistem ekonomi dan politik. Dalam sebuah ungkapan awal tentang apa yang disiratkan oleh hubungan timbal balik tersebut, Deklarasi Cocoyoc pada tahun 1974 menyatakan bahwa keberlanjutan mengaitkan “batas-batas dalam” kebutuhan manusia dengan “batas-batas luar” sumber daya bumi (Jenkins, et.al., 2010). Brundtland (1987) bersama Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan pentingnya keberlanjutan. Keberlanjutan didefinisikan sebagai suatu bentuk pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Khalili, 2011).

Weitzman (1997) dalam Khalili (2011) mendefinisikan keberlanjutan mengarah pada pembahasan dampak-dampak dari ini dengan mendefinisikan dan merumuskan hubungan antara sistem ekonomi manusia yang dinamis dan sistem ekologi yang berubah lebih lambat, di mana kehidupan manusia dapat terus berlanjut tanpa batas waktu, individu – individu manusia dapat tumbuh subur, dan budaya manusia dapat berkembang, sementara keragaman, kompleksitas, dan fungsi sistem pendukung kehidupan ekologi dilindungi. Menurut Thomas N. Gladwin, et.al., (1993) dalam Khalili (2011), keberlanjutan juga merupakan kondisi ekonomi dimana tuntutan yang diberikan kepada lingkungan dan sumber daya alam oleh manusia dan perdagangan dapat dipenuhi tanpa mengurangi kapasitas lingkungan untuk menyediakannya bagi generasi mendatang.

Perman, et. al.,(1997) dalam Sudirman (2018) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian: (1) Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption); (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang; (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining); (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam; dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Dapat diakui bahwa meskipun konsep keberlanjutan terlihat sederhana, namun sebenarnya kompleks dan memiliki makna yang sangat multidimensi serta multi-interpretasi (Fauzi, 2019). Dari beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan merupakan kondisi yang menciptakan adanya hubungan timbal balik antara sistem manusia dan sistem ekologi dengan memperhatikan ‘batas-batas’ dalam manusia dan ‘batas-batas luar’ sumber daya alam (bumi) agar apa yang menjadi kebutuhan manusia tetap dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

## **2. Pilar Keberlanjutan**

Konsep keberlanjutan mulai dikenal pada tahun 1970-an bersamaan dengan mulai dipertimbangkannya dampak manusia terhadap lingkungan pada Konferensi PBB tahun 1972 di Stockholm (Purvis, 2018). Hingga saat ini, konsep keberlanjutan masih terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan mengenai sifat keberlanjutan yang beragam dan kompleks. Karena sifatnya yang terintegrasi, keberlanjutan diklasifikasikan ke dalam tiga sistem

keberlanjutan atau juga dikenal dengan tiga pilar keberlanjutan. Tiga pilar ini dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1994, adapun tiga pilar keberlanjutan tersebut terdiri dari : ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Harris, 2000; Khalili, 2011; Rahadian, 2016; Purvis, 2018; Sudirman, 2018;(Fauzi, 2019))

(1) Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi berfokus pada bagian dari basis sumber daya alam yang menyediakan input fisik, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, kedalam proses produksi. Dalam istilah ekonomi, keberlanjutan dapat digambarkan sebagai ‘pemeliharaan modal’ atau ‘modal yang tidak menurun’ dimana modal yang dimaksud adalah modal buatan manusia. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

(2) Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan menambahkan input fisik ke dalam proses produksi, dengan menekankan pada sistem pendukung kehidupan lingkungan seperti atmosfer, air, dan tanah. Menurut kelestarian lingkungan, kapasitas layanan lingkungan harus dipertahankan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penipisan (lapisan ozon) dan kerusakan (lingkungan) yang terus menerus oleh aktivitas manusia terhadap layanan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat digantikan tidak sesuai dengan tujuan kelestarian lingkungan. Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

### (3) Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial dapat diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Keberlanjutan sosial membahas kemiskinan dan pembangunan manusia. Pengentasan kemiskinan, salah satunya, merupakan tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan, atau pemeliharaan sistem pendukung kehidupan, merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan sosial.

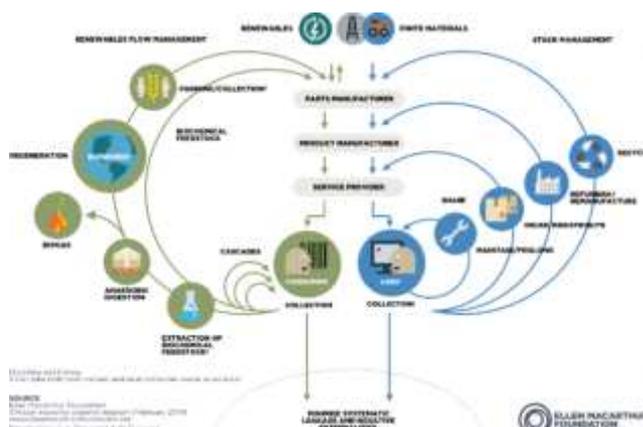
Pengelolaan sampah rumah tangga kawasan pesisir menjadi perhatian utama dalam konteks keberlanjutan. Untuk mendukung konsep keberlanjutan tersebut, saat ini telah diperkenalkan model ekonomi sirkular yang dipopulerkan oleh Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2013. Konsep ekonomi sirkular memainkan peranan penting seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Tantangan pengelolaan sampah yang berbasis keberlanjutan semakin mendesak, dan penerapan model ekonomi sirkular dapat menjadi salah satu solusi.

### 3. Tinjauan Tentang Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular merupakan sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional (buat, gunakan, buang) dimana para pelaku ekonomi menjaga agar sumber daya yang ada dapat digunakan dalam jangka waktu selama mungkin dengan memaksimalkan nilai kegunaan dari sumber daya tersebut, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan baku pada setiap akhir umur layanan (Zaenafi Ariani et al., 2022). Model ekonomi sirkular menjadi salah satu model ekonomi yang ditawarkan kepada dunia dimana hal ini berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab melalui serangkaian proses yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), *replace* (mengganti), dan *repair* (memperbaiki) (Purwanti, 2021).

Ekonomi sirkular telah diusulkan sebagai solusi untuk meminimalkan input bahan baku dan timbulan limbah (Velenturf et al., 2019).

Gambar 2.1 merupakan model ekonomi sirkular yang dikembangkan oleh Ellen MacArthur Foundation sejak tahun 2013. (MacArthur, 2013) menjelaskan, ekonomi sirkular adalah sebuah sistem industri yang bersifat restoratif atau regeneratif berdasarkan niat dan desain. Sistem ini menggantikan konsep 'akhir masa pakai' dengan restorasi, bergeser ke arah penggunaan energi, terbarukan, menghilangkan penggunaan bahan kimia beracun, yang merusak penggunaan kembali, dan bertujuan untuk menghilangkan limbah melalui desain bahan, produk, sistem, dan di dalam hal ini, model bisnis yang unggul.



**Gambar 2.1 Model Ekonomi Sirkular (2013)**  
(Sumber : [ellenmacarthurfoundation.org](http://ellenmacarthurfoundation.org), 2023)

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2019), terdapat lima prinsip utama dari konsep ekonomi sirkular atau lebih dikenal dengan 5R yaitu *Reduce*, *Reuse*, *Recovery*, dan *Repair*. Lima prinsip tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan material metal dari alam (*reduce*) melalui optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali (*reuse*) dan penggunaan material hasil dari proses daur ulang (*recycle*) maupun dari proses perolehan kembali (*recovery*) atau dengan melakukan perbaikan (*repair*).

(Islami, 2022) merangkum konsep ekonomi sirkular adalah konsep untuk menggunakan sumber daya, sampah, emisi, dan energi terbuang yang dapat diminimalisir dengan cara mengurangi siklus produksi – konsumsi melalui sistem perpanjangan umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, daur ulang untuk menjadi produk kembali (recycling) dan daur ulang menjadi produk lain (upcycling). Hal ini bertujuan untuk mengubah paradigma ekonomi yang dulunya menggunakan model linear ekonomi menjadi sirkular ekonomi.

Penerapan ekonomi sirkular memiliki beberapa prinsip dasar, Ellen MacArthur Foundation (2013) merumuskan prinsip – prinsip ekonomi sirkular kedalam 3 hal, yaitu:

- (1) Nirlimbah, desainnya menghilangkan limbah dan polusi,
- (2) Pemanfaatan Berkelanjutan, produk dan materialnya dipastikan bisa terus dimanfaatkan,
- (3) Sistem alam yang dihasilkannya bersifat regeneratif.

Prinsip – prinsip tersebut kemudian diterjemahkan kembali oleh (Zaenafi Ariani et al., 2022) dengan penjelasan sebagai berikut :

- (a) Bertujuan untuk merancang keluarnya limbah karena produk yang dioptimalkan untuk dapat dibongkar dan digunakan kembali,
- (b) Sirkularitas memperkenalkan pada diferensiasi antara komponen bahan habis pakai dan tahan lama pada suatu produk.
- (c) Energi yang diperlukan untuk siklus ini harus terbarukan oleh alam agar dapat mengurangi ketergantungan sumber daya dan meningkatkan sistem ketahanan (seperti guncangan minyak).

Konsep ekonomi sirkular saat ini digunakan oleh berbagai negara untuk mengurangi potensi emisi gas yang dihasilkan dari penumpukan sampah maupun berbagai aktivitas manusia lainnya. Berdasarkan serangkaian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi sirkular merupakan sebuah alternatif berbasis sirkular dalam sistem industri yang bersifat

restoratif dan regeneratif sebagai upaya untuk meminimalisir sumber daya yang terbuang melalui optimalisasi proses produksi.

#### 4. Pengelolaan Sampah Bebas Ekonomi Sirkular

Pengelolaan sampah yang mayoritas masih digunakan oleh pemerintah dan tertuang dalam regulasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ialah model *open dumping*. *Open dumping* merupakan sistem pembuangan sampah terbuka di TPA yang hanya dibiarkan menggunung tanpa adanya upaya pengelolaan lebih lanjut. Sampah yang terkumpul dan kemudian tertimbun ini berpotensi mencemari lingkungan, mulai dari pencemaran air hingga pencemaran udara. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap dan memicu berbagai macam penyakit, gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah di TPA juga semakin mendorong kerusakan lapisan ozon hingga 21 kali lipat dibanding gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) (Terang, 2022).

Salah satu hal penting dalam kajian ekonomi sirkular ialah sampah. Sampah tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang dibuang, namun juga berbagai bentuk pemborosan energi, dan kegiatan yang bersifat pemborosan atau penggunaan barang sekali pakai yang kemudian menjadi rongsokan dan tidak terpakai. Kesadaran konsumen (masyarakat) terhadap berbagai potensi penghasil sampah perlu ditingkatkan agar dampak pengurangannya dapat lebih dirasakan. Dengan mengadaptasi konsep ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah, manfaat dan nilai dari suatu produk diharapkan lebih mampu untuk dioptimalisasi, sehingga masa pakai produk tersebut jadi lebih panjang dan mampu mengurangi volume sampah yang ada (Islami, 2022).

Konsep ekonomi sirkular mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan telah banyak direalisasikan di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, potensi ekonomi sirkular dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan juga dibahas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) yang menyebutkan bahwa nilai manfaat secara ekonomi bagi Indonesia dapat mencapai Rp593-638 triliun lebih banyak jika dibandingkan dengan *business as usual* pada 2030. Selain itu, dari segi lingkungan dan sosial, potensi sampah dapat berkurang sebanyak 18-52%, mengurangi emisi karbon 126 juta ton, bahkan dapat menyediakan *net job* sebanyak 4,4 juta pekerjaan jika dibandingkan dengan *business as usual* pada tahun 2030 (Purusottama et al., 2022). De Boer et al., 2021 dalam (Pambudi, 2023) menyebutkan, ekonomi sirkular merupakan metode yang telah teruji untuk mempromosikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota dan meningkatkan produksi yang ramah lingkungan serta melindungi sumber daya alam. Menerapkan ekonomi sirkular akan membantu mencegah sampah masuk ke lingkungan, mengurangi pemborosan, dan meminimalkan dampak lingkungan yang timbul akibat persoalan sampah.

Di satu sisi, menerapkan ekonomi sirkular akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk melihat masalah sampah secara berbeda karena menggunakan sampah sebagai bahan baku untuk memproduksi barang – barang bernilai tambah yang dapat digunakan kembali dan memanfaatkan sampah untuk menciptakan nilai dan potensi ekonomi baru. Di sisi lain, menerapkan ekonomi sirkular akan membantu mengubah cara pandang kita terhadap lingkungan dan cara berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, penerapan ekonomi sirkular merupakan langkah penting yang dapat diambil oleh para pembuat kebijakan untuk melindungi lingkungan dan memajukan ekonomi secara bersamaan (Pambudi, 2023).

## **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan sebagai referensi penelitian ialah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
Ahmad Fadil Rangkuti, Susilawati (2022) – Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Pantai Sibolga	Dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan teori apa yang digunakan, namun diberikan penjelasan terkait strategi yang bersifat teknis sebagai upaya pengelolaan sampah melalui 5 tahapan dan 3 unsur penunjang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah pesisir pantai Sibolga, pemerintah menjalankan sejumlah strategi yang bersifat teknis yang terdiri dari 5 tahapan yaitu: (i) pewadahan, (ii) pengumpulan, (iii) pengangkutan, (iv) pengolahan, dan (v) pemrosesan akhir. Serta 3 unsur penunjang berupa: (a) kelembagaan, (b) pembiayaan, dan (c) peraturan. Pada praktiknya, pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai Sibolga sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat sejumlah masyarakat dan pengunjung yang memiliki tingkat kesadaran yang kurang dalam menjaga kebersihan sekitar pantai Sibolga. Sehingga, sebagian kawasan pesisir pantai Sibolga masih terlihat kotor.
Adinda Syalwa Jayantri, Mohammad Agung Ridlo (2021) – Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Pantai.	Strategi yang digunakan pada 6 studi kasus pengelolaan sampah di kawasan pantai di beberapa wilayah pesisir di Indonesia melalui metode 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ).	Berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada 6 studi kasus strategi pengelolaan sampa di kawasan pantai di beberapa wilayah pesisir Indonesia diantaranya: (1) Pantai Kota Pariaman (Ermawati dkk, 2018); (2) Pantai Parangtritis (Masjhoer, 2011), (3) Pantai Pangandaran (Morgan, 2019); (4) Pantai Pulang Sawal Gunungkidul (Masjhoer,2018); (5) Pantai Baru Bantul (Ahmad, 2017); dan (6) Pantai Candikusuma, Kabupaten Jembrana, Bali (Megawan dan Suryawan, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemilahan terlebih dahulu, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya sampah diolah melalui proses 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ). <i>Reduce</i> yakni mengurangi penggunaan plastic yang nantinya akan menjadi

		sampah. <i>Reuse</i> yakni menggunakan kembali seperti botol-botol minuman yang sama dan sejenis lalu dibersihkan dan disortir sesuai jenis dan ukurannya. Kemudian dapat dimanfaatkan kembali menjadi kemasan produk ataupun lainnya yang telah diproduksi, dan untuk pengelolaan sampah dengan cara <i>Recycle</i> yaitu mendaur ulang kembali sampah anorganik menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa berpeluang menjadi usaha baru masyarakat dikawasan pantai.
Fatmawaty Mallapiang, Yessi Kurniati, Sukfitrianty Syahrir, Abd. Majid HR Lagu, & Rimawati Aulia Insani Sadarang (2020) - Pengelolaan sampah dengan pendekatan <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD) di wilayah pesisir Bulukumba Sulawesi Selatan.	Model pengelolaan sampah dengan pendekatan <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD) yang dikembangkan oleh John McKnight (1996) dan identifikasi aset menurut Susilawaty, et al. (2018) yang terdiri dari aset manusia, aset fisik, aset alam, aset sosial dan aset finansial.	Pendekatan ABCD berasumsi bahwa yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan dimulai dari perbaikan modal sosial (McKnight, 1996). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gunturu terdapat <i>aset fisik</i> berupa rumah kepala desa dan masjid yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, <i>aset manusia</i> yaitu kepala dusun dan ketua RT/RW yang siap memberikan dukungan, <i>aset sosial</i> yaitu karang taruna dan kader posyandu yang dapat menggerakkan warga untuk berpartisipasi, <i>aset finansial</i> berupa kesediaan warga menyediakan logistik kegiatan dan aset alam berupa lahan perkebunan dan pertanian yang menjadi sumber sampah organik sekaligus tempat untuk menyalurkan pupuk kompos hasil pengolahan sampah.

Sumber : Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadil Rangkuti, Susilawati (2022) berfokus pada strategi pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Sibolga. Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, tidak disebutkan secara tertulis pendekatan atau teori strategi milik siapa yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi

permasalahan sampah di wilayah pesisir pantai Sibolga, pemerintah menjalankan sejumlah strategi yang bersifat teknis yang terdiri dari 5 tahapan yaitu: (i) pewadahan, (ii) pengumpulan, (iii) pengangkutan, (iv) pengolahan, dan (v) pemrosesan akhir. Serta 3 unsur penunjang berupa: (a) kelembagaan, (b) pembiayaan, dan (c) peraturan. Pada praktiknya, pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai Sibolga sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat sejumlah masyarakat dan pengunjung yang memiliki tingkat kesadaran yang kurang dalam menjaga kebersihan sekitar pantai Sibolga. Sehingga, sebagian kawasan pesisir pantai Sibolga masih terlihat kotor.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Adinda Syalwa Jayantri, Mohammad Agung Ridlo (2021), penelitian tersebut merupakan studi literatur yang mengkaji penerapan strategi dalam upaya pengelolaan sampah di sejumlah kawasan pantai di Indonesia. Strategi yang digunakan pada 6 studi kasus pengelolaan sampah di kawasan pantai di beberapa wilayah pesisir di Indonesia ialah berupa penerapan pengelolaan sampah dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemilahan terlebih dahulu, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya sampah diolah melalui proses 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). *Reduce* yakni mengurangi penggunaan plastic yang nantinya akan menjadi sampah. *Reuse* yakni menggunakan kembali seperti botol-botol minuman yang sama dan sejenis lalu dibersihkan dan disortir sesuai jenis dan ukurannya. Kemudian dapat dimanfaatkan kembali menjadi kemasan produk ataupun lainnya yang telah diproduksi, dan untuk pengelolaan sampah dengan cara *Recycle* yaitu mendaur ulang kembali sampah anorganik menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa berpeluang menjadi usaha baru masyarakat dikawasan pantai.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty Mallapiang, dkk. (2020) yang berfokus pada model pengelolaan sampah di wilayah pesisir Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based*

*Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh (McKnight, 1996) dan ditunjang dengan identifikasi aset menurut Susilawaty, et al. (2018) yang terdiri dari aset manusia, aset fisik, aset alam, aset sosial dan aset finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gunturu terdapat *aset fisik* berupa rumah kepala desa dan masjid yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, *aset manusia* yaitu kepala dusun dan ketua RT/RW yang siap memberikan dukungan, *aset sosial* yaitu karang taruna dan kader posyandu yang dapat menggerakkan warga untuk berpartisipasi, *aset finansial* berupa kesediaan warga menyediakan logistik kegiatan dan aset alam berupa lahan perkebunan dan pertanian yang menjadi sumber sampah organik sekaligus tempat untuk menyalurkan pupuk kompos hasil pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dijabarkan diatas, peneliti memutuskan untuk mengambil penelitian dengan tema penerapan strategi *Non-Governmental Organization* (NG) dalam upaya pengelolaan sampah di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, dengan studi pada NGO Gajahlah Kebersihan. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terakait bagaimana Gajahlah Kebersihan selaku NGO di tingkat lokal yang memiliki fokus terhadap isu sampah laut (*marine debris*) berupaya untuk menerapkan sejumlah strategi yang dimiliki dalam rangka mengelola sampah di kawasan pesisir perkotaan di Bandar Lampung.

Alasan peneliti mengkaji terkait strategi NGO dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir ini ialah dikarenakan topik terkait peranan atau kontribusi pihak ketiga dalam upaya pengelolaan sampah melalui penerapan strategi belum banyak dikaji oleh peneliti di Indonesia. Organisasi pihak ketiga seperti NGO Gajahlah Kebersihan dapat memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah mempercepat upaya penanganan sampah yang lebih inovatif dan berbasis keberlanjutan sebagaimana yang saat ini sedang diperkenalkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen (1997) yang terdiri dari: (1) *corporate strategy* (strategi

organisasi), (2) *program strategy* (strategi program), (3) *resources support strategy* (strategi sumber daya pendukung), dan (4) *institutional strategy* (strategi kelembagaan). Kehadiran NGO lokal memiliki kontribusi penting untuk menggerakkan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *bottom up* yang berfokus pada menciptakan perubahan pola pikir (*mindset shift*) dan kesadaran di masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial, ekonomi serta budaya.

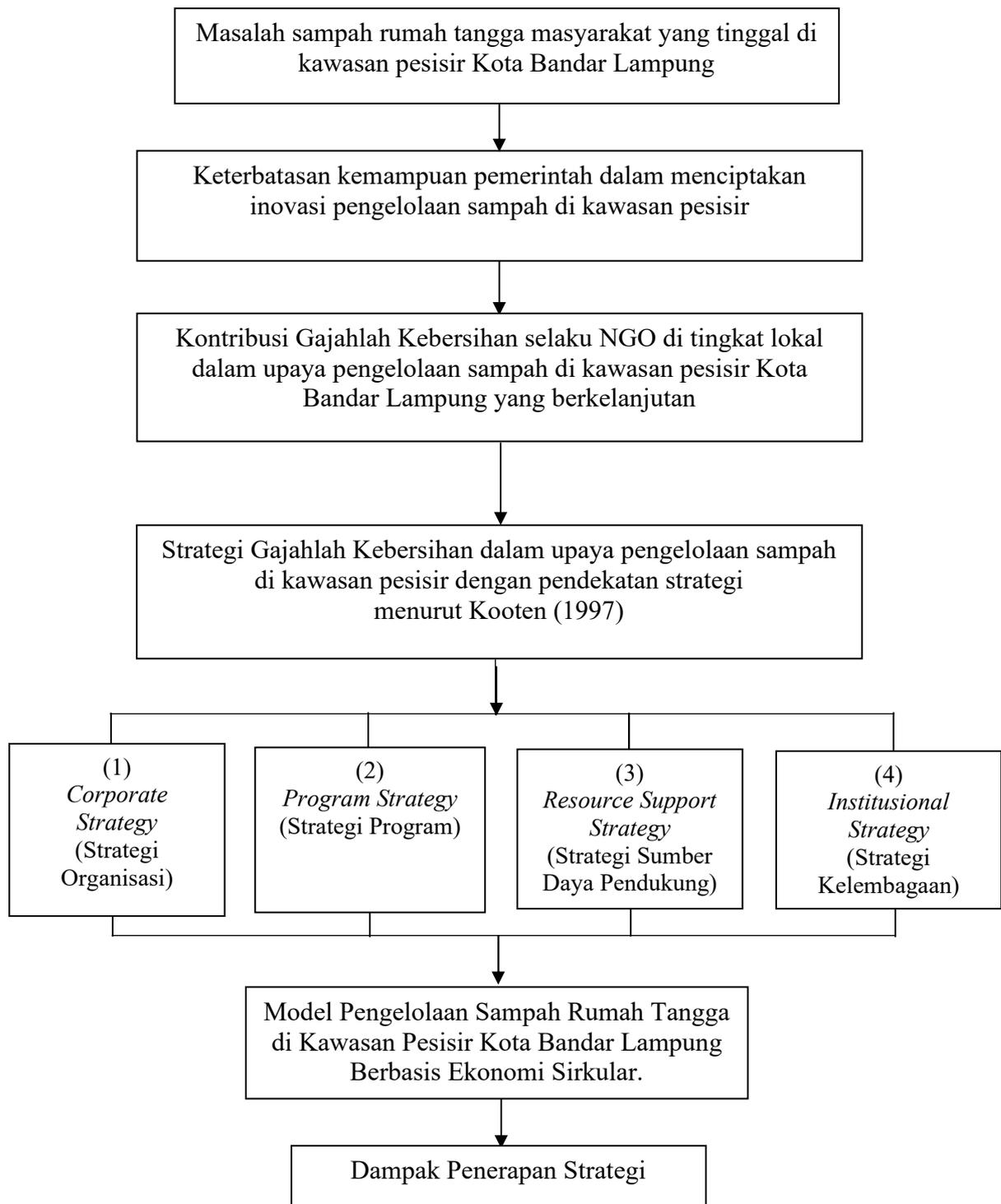
## F. KERANGKA PEMIKIRAN

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang menjadi pertemuan antara daratan dan lautan yang memiliki potensi kekakayaan alam yang berlimpah. Namun, potensi ini tidak disertai dengan kesadaran masyarakat untuk menjaganya yang berujung pada peningkatan jumlah timbulan sampah di kawasan pesisir. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal seperti penerbitan regulasi tentang penanganan sampah dan penyediaan layanan pengangkutan sampah yang hanya mampu menjangkau jalan – jalan protokol, belum cukup optimal untuk menurunkan angka timbulan sampah, khususnya yang dihasilkan oleh warga di kawasan pesisir. Kehadiran NGO memainkan peranan penting di tengah masyarakat karena dianggap mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat termasuk dalam praktik pengelolaan sampah.

Gajahlah Kebersihan selaku NGO lingkungan di tingkat lokal yang memiliki fokus terhadap isu sampah laut, hadir sebagai katalisator atau penggerak perubahan dalam menciptakan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Permasalahan sampah yang menjadi fokus dari Gajahlah Kebersihan dalam penelitian ini ialah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga masyarakat pesisir di Pulau Pasaran. Hal ini dikarenakan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga lebih mampu dikelola dan dicari solusi penanganannya jika dibandingkan dengan

sampah yang berasal dari sungai maupun sampah yang berada di laut yang skala cakupan dan sumber sampahnya terlalu luas.

Strategi yang dijalankan oleh Gajahlah Kebersihan mengadopsi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah sampah yang terbuang dan tidak terkelola oleh masyarakat, serta mengoptimalkan nilai suatu barang atau sampah melalui inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan model strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen (1997) yang terdiri dari: (1) *corporate strategy* (strategi organisasi), (2) *program strategy* (strategi program), (3) *resources support strategy* (strategi sumber daya pendukung), dan (4) *institutional strategy* (strategi kelembagaan). Dengan mengetahui strategi yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan, maka akan diketahui implikasi atau dampak dari penerapan strategi bagi masyarakat pesisir sebagai sasaran organisasi. Dampak yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya ialah (a) dampak sosial, (b) dampak ekonomi, dan (c) dampak lingkungan, sebagaimana mengacu pada tiga pilar keberlanjutan.



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Disusun Oleh Penulis, 2023

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam (Moleong, 2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Paradigma kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat alamiah seperti masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualitatif penting dilakukan untuk mengungkapkan enam hal diantaranya mendalami makna, memahami dan mendalami konteks, mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (*unanticipated phenomena*), memahami proses yang terjadi dibalik fenomena, membangun penjelasan kausalitas (*causal explanation*), dan mendeskripsikan pola-pola (*patterns*) (Creswell, 2017).

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci (Shelawati, 2022). Pendekatan studi kasus adalah strategi yang dapat digunakan oleh peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Creswell, 2017).

Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrumental yang bertujuan untuk mempelajari suatu kasus yang mana hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi suatu teori yang sudah ada atau juga dapat digunakan untuk mencetuskan teori baru (Sugiyono, 2018). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana strategi Gajahlah Kebersihan selaku NGO di tingkat

lokal dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

## **B. FOKUS DAN LOKUS PENELITIAN**

### **1. Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian, diperlukan adanya fokus penelitian. Fokus penelitian dapat didefinisikan sebagai masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahannya. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang dengan data yang ditentukan di lapangan (Shelawati, 2022).

Adapun fokus pada penelitian ini diantaranya ialah:

- 1) Strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan oleh NGO Gajahlah Kebersihan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung melalui penerapan tipe – tipe strategi menurut Jack Koteen (1997) yang terdiri dari:
  - (a) *Corporate strategy* (strategi organisasi) yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai – nilai, dan inisiatif – inisiatif strategi dalam rangka mengatasi isu sampah laut (*marine debris*) khususnya yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
  - (b) *Program strategy* (strategi program) berupa program – program pengelolaan sampah di kawasan pesisir dan laut yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir.

- (c) *Resources support strategy* (strategi pendukung sumber daya) yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam organisasi seperti sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan lain – lain guna mendukung keberlangsungan hidup organisasi.
- (d) *Institutional strategy* (strategi kelembagaan) yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif – inisiatif stratejik. . Inisiatif – inisiatif stratejik yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa visi, misi, tujuan organisasi, serta program – program yang dimiliki oleh organisasi. Untuk bisa melaksanakan inisiatif tersebut, organisasi memerlukan beberapa kemampuan khusus. Salah satu kemampuan (*skill*) organisasi yang dibutuhkan ialah kemampuan berkolaborasi dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain.

Pengelolaan sampah di kawasan pesisir yang diimplementasikan oleh Gajahlah Kebersihan mengadaptasi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dikemukakan oleh Ellen MacArthur (2013).

- 2) Dampak penerapan pengelolaan sampah di kawasan pesisir berupa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak yang dikaji dalam penelitian ini merupakan dampak jangka pendek, dikarenakan dapat dilihat secara langsung hasilnya setelah strategi dijalankan.

## 2. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data - data penelitian yang akurat (Moleong, 2017). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pusat Gajahlah Kebersihan serta Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Pulau Pasaran merupakan salah satu kawasan pesisir

pantai Kota Bandar Lampung yang dihuni sekitar 1.500 jiwa atau 354 Kepala Keluarga (KK) dan menjadi sentra olahan produk ikan dan cumi yang diasinkan. Pulau Pasaran merupakan salah satu kawasan pesisir yang saat ini menjadi fokus dari Gajahlah Kebersihan dalam menjalankan strategi program pengelolaan sampah di kawasan pesisir.

## **C. JENIS DAN SUMBER DATA**

### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain - lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Sedangkan bentuk operasional dari data penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif berupa narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen - dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh dan banyak hal yang tidak didominasi angka - angka sebagaimana penelitian kuantitatif (Rahman, 2022).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam analisis data penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan/ observasi dan wawancara (Wulandari, 2017)

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penunjang data primer yang dapat berupa dokumen dan lain - lain (Moleong, 2017). Data sekunder dibutuhkan bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian. Oleh karena itu, peneliti harus selektif dan hati - hati dalam memilih dan menggunakannya (Rahman, 2022).

## D. INFORMAN PENELITIAN

### 1. Informan

Informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Pasolong, 2020). Informan penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang dianggap benar - benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan yang tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian (Rahman, 2022). Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga diantaranya (Heryana, 2018).

#### (a) Informan Kunci

Informan yang memiliki informasi secara menyeluruh permasalahan yang diangkat peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang kondisi masyarakat secara garis besar tetapi juga memahami informasi tentang informan utama.

#### (b) Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang dipelajari.

#### (c) Informan Pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan	Tanggal
1.	Dicky Dwi Alfandy	<i>Sustainable Director</i> Gajahlah Kebersihan	15 Juli 2023, 30 juli 2023, 6 September.
2.	Feri Anggara A.G	<i>Community Development Staff</i>	14 Juli 2023
3.	Vincent Ageng K.D	<i>Public &amp; Government Relation Manager</i>	22 Juli 2023, 2 Agustus 2023.
4.	Bambang Heriyanto	Lurah Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung	7 Juli 2023, 8 September 2023
5.	Said	Ketua RT 09 Pulau Pasaran	8 Juli 2023
6.	Dahlia	Ketua ‘Kartini Pasaran’ dan Masyarakat Pulau Pasaran	8 Juli 2023
7.	Ropiah	Bendahara ‘Kartini Pasaran’ dan Masyarakat Pulau Pasaran	8 Juli 2023
8.	Juju	Anggota ‘Kartini Pasaran’ dan Masyarakat Pulau Pasaran	8 Juli 2023
9.	Achmad Jon Viktor	Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	24 Oktober 2023
10.	Robi Suliska	Kepala Sub Bagian Humas dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	20 Oktober 2023
11.	Solbintaron	Kepala UPT Persampahan Kecamatan Teluk Betung Timur	28 Oktober 2023

*Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023.*

## E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai *setting* dan sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis

dan psikologis seperti melihat, mengamati, mencermati, dan merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Pasolong, 2020). Penelitian mengobservasi upaya yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan dalam mengelola sampah di kawasan pesisir yang diturunkan melalui strategi dan juga program – program di masyarakat, termasuk perilaku organisasi dan perilaku masyarakat terkait isu sampah di kawasan pesisir.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi dapat juga diberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab di kesempatan lain. Wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (telepon atau surat elektronik). Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya (Sugiyono, 2018). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung yakni dengan bertemu secara luring dengan informan, dan tidak langsung yang dapat dilakukan melalui sambungan telepon, maupun wawancara melalui percakapan secara luring.

## **3. Dokumentasi**

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, peraturan pemerintah, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan data sekunder sebagai penguat penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

## **4. Studi Kepustakaan**

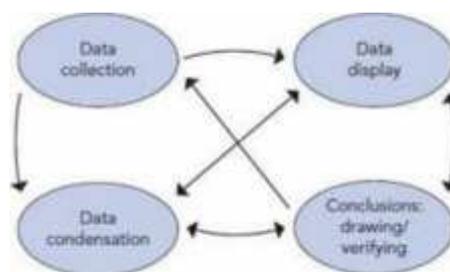
Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diambil oleh peneliti bersumber dari jurnal, buku referensi maupun review yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di

kawasan pesisir. Penelitian di masa lalu dapat menjadi bahan perbandingan atau dapat memberikan gagasan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, khususnya penemuan sebelumnya dapat memberikan arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di kawasan pesisir perkotaan.

## F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2018). Moleong (2017) mensintesiskan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh secara akurat dan objektif menjadi tujuan utama dalam penelitian, analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara kepada informan. Peneliti mengacu pada teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis* yang dikutip oleh Sugiyono (2018) diantaranya :



**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1994)**

*Sumber* : (Miles et al., 2014)

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian diuraikan atau dilaporkan secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni strategi Gajahlah Kebersihan dalam mengelola sampah khususnya di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian rupa sehingga data tersebut lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti. Pada penelitian dengan model pendekatan kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antar kategori dan dilakukan dengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab masalah yang sebelumnya telah dirumuskan yang disimpulkan setelah dilakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir berupa penjelasan deskriptif tentang bagaimana penerapan strategi Gajahlah Kebersihan dalam upaya mengelola sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir.

## **G. TEKNIK KEABSAHAN DATA**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reliabilitas menurut versi 'positivisme' dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan sendiri (Moleong, 2017). Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness of data*) diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Moleong (2017) menyebutkan ada

empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan untuk menguji keabsahan data. Dalam penjaminan keabsahan data, Moleong (2017) menjelaskan beberapa teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan, diantaranya :

### **1. Triangulasi**

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan atau keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

### **3. Ketersediaan Referensi**

Ketersediaan referensi yaitu mengumpulkan data berupa rekaman-rekaman, catatan-catatan dalam wawancara dan foto-foto dokumentasi yang digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Penulis mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara (transkrip) dengan para informan, foto-foto dokumentasi guna menjadi salah satu acuan dalam menganalisis data (Rahman, 2022).

### **4. Pemeriksaan Sejawat**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan - rekan

sejawat dengan maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Selain itu, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan strategi Non Government Organization (NGO) dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Gajahlah Kebersihan sudah berjalan dengan cukup baik. Perapan strategi yang berfokus pada aspek edukasi, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir dapat terlaksana dengan cukup baik dengan memaksimalkan partisipasi dari sejumlah stakeholder diantaranya sektor pemerintah, swasta, akademisi, media dan masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Inovasi pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan pesisir menjadi produk daur ulang berupa kompos, eco enzim, eco roster, serta kerajinan tangan dari olahan sampah plastik, mampu mengurangi jumlah timbulan sampah yang terbuang ke lingkungan dan laut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu sampah di kawasan pesisir.
2. Penerapan strategi yang dilakukan Gajahlah Kebersihan dalam upaya pengelolaan sampah di kawasan pesisir memberikan dampak positif pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Penerapan program pengelolaan sampah di Pulau Pasaran sebagai *pilot project* pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, Gajahlah Kebersihan mampu menciptakan alternatif usaha bagi ibu – ibu di Pulau Pasaran melalui pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik yang di daur ulang. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan agar tidak

membuang sampah ke lingkungan sekitar rumah dan laut juga mampu mengurangi jumlah timbunan sampah yang terbuang dan mencemari kawasan pesisir.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, sejumlah saran untuk mengoptimalkan strategi pengelolaan sampah di kawasan pesisir antara lain :

1. Bagi Gajahlah Kebersihan, diperlukan adanya peningkatan dalam aspek kampanye digital. Pembuatan konten yang lebih menarik, informatif, dan memotivasi dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan *stakeholder* terkait, seperti adanya layanan pelaporan lokasi pembuangan sampah ilegal atau kondisi yang memerlukan perhatian khusus diharapkan mampu meningkatkan respon cepat dalam pengelolaan sampah. Pemanfaatan media sosial selain Instagram perlu ditingkatkan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat dijangkau dan teredukasi. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
2. Bagi pemerintah daerah, perlu adanya rapat bersama antara pihak DLH Provinsi Lampung dan DLH Kota Bandar Lampung untuk membahas terkait kewenangan dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Hal ini bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas batasan dan cakupan wilayah kerja administratif bagi masing – masing instansi agar tidak lagi menimbulkan konflik dikemudian hari. Implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut juga perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut agar dapat diterapkan di Lampung sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sampah laut dan kawasan pesisir, sehingga isu sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, namun

lebih luas lagi mengingat Lampung merupakan daerah yang dikelilingi dengan kawasan pesisir dan laut. Kontribusi pemerintah perlu ditingkatkan dan tidak hanya terbatas pada dukungan moril, konsultasi dan perizinan. Perlu adanya evaluasi kembali terkait anggaran untuk pengelolaan sampah di tingkat Kota Bandar Lampung agar layanan pengangkutan sampah dapat berjalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afivah, N. I., Fitra, H. A., & Munirwan, H. (2020). *TINGKAT PENGARUH DAN KEPENTINGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI PULAU PASARAN, KOTA BANDAR LAMPUNG*. 16.
- Anggara, K. (2009). Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jakarta: Universitas Indonesia*.
- Ayun, N. Q. (2019). Analisis mikroplastik menggunakan FT-IR pada air, sedimen, dan ikan belanak (Mugil cephalus) di segmen Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Bappenas. (2021). The economic, social, and environmental benefits of a circular economy in Indonesia. *AlphaBeta Advisors*. <https://alphabeta.com/our-research/the-economic-social-and-environmental-benefits-of-a-circular-economy-in-indonesia/>
- Bappenas. (2022). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. [www.sdgs.bappenas.go.id](http://www.sdgs.bappenas.go.id)
- Bayu, V. C. V. V. (2021). *STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGATASI KEKURANGAN TENAGA PENDIDIK DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Berman, E. M. (1998). *Productivity in Public and Non Profit Organizations: Strategies and Techniques*. SAGE.
- Beaumont, N. J., Aanesen, M., Austen, M. C., Börger, T., Clark, J. R., Cole, M., Hooper, T., Lindeque, P. K., Pascoe, C., & Wyles, K. J. (2019). Global ecological, social and economic impacts of marine plastic. *Marine Pollution Bulletin*, 142, 189–195. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.022>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

- Durand, S. S. (2012). *STUDI POTENSI SUMBERDAYA ALAM DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN MINAHASA SELATAN / JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN TROPIS*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JPKT/article/view/107>
- Fauzi, A. (2019). *Teknik analisis keberlanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, A. (2000). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, ctk. *Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Gajahlah Kebersihan. (2022). Dokumen Rencana Program Kerja Gajahlah Kebersihan – *Marine Debries Warrior*. Tidak dipublikasikan.
- Gajahlah Kebersihan. (2022). *Komunitas Gajahlah Kebersihan*. Bebas Sampah ID.  
<https://www.gajahlahkebersihan.com>
- García-Hermosa, M. I., & Woodall, L. C. (2023). Marine plastic: The solution is bigger than removal. *Frontiers in Sustainability*, 4.  
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsus.2023.1023480>
- Heryana, A. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.
- Higgins, J. M. (1985). *Strategy: Formulation, implementation, and control*. Dryden Press.
- Islami, P. Y. N. (2022). Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Sampah Pesisir: Studi Kasus Pengelolaan Sampah Pulau Pasaran Bandar Lampung. *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)*, 4, 512–520.
- Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. (2022). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PANTAI. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20021>
- Jenkins, C. S. (2010). Concepts, experience and modal knowledge. *Philosophical Perspectives*, 24, 255–279.
- Löhr, A., Savelli, H., Beunen, R., Kalz, M., Ragas, A., & Belleghem, F. V. (2017). Solutions for global marine litter pollution. *Current Opinion in*

*Environmental Sustainability*, 28, 90–99.  
<https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.08.009>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). Industri Berperan Ciptakan Indonesia Bersih Lewat Konsep Circular Economy diakses melalui laman <https://kemenperin.go.id/artikel/20324/Industri-Berperan-Ciptakan-Indonesia-Bersih-Lewat-Konsep-Circular-Economy> , pada 15 Mei 2023.

Khalili, N. (2011). *Practical sustainability: From grounded theory to emerging strategies*. Springer.

Koteen, J. (1997). *Strategic management in public and nonprofit organizations: Managing public concerns in an era of limits*. Westport, Conn. : Praeger.  
[http://archive.org/details/strategicmanagem0000kote\\_g3f9](http://archive.org/details/strategicmanagem0000kote_g3f9)

Lewis, D. (2009). Non-governmental organisations (NGOs): Definition and history. *The International Encyclopaedia of Civil Society*.

MacArthur, E. (2013). Towards the circular economy. *Journal of Industrial Ecology*, 2(1), 23–44.

Mahyudin, R. P. (2016). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN. *EnviroScienteeae*, 10(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.20527/es.v10i1.1962>

Mallapiang, F., Kurniati, Y., Syahrir, S., Lagu, A. M. H., & Sadarang, R. A. I. (2020). Pengelolaan sampah dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) di wilayah pesisir Bulukumba Sulawesi Selatan. *Riau Journal of Empowerment*, 3(2), 79-86.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 102–107.

OECD. (2023). *Ocean economy and developing countries—OECD*.  
<https://www.oecd.org/ocean/topics/developing-countries-and-the-ocean-economy/>

Pambudi, Y. S. (2023). *MENCAPAI PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN BERKELANJUTAN: PANDUAN LENGKAP*. Penerbit Adab.

[https://www.google.co.id/books/edition/MENCAPAI\\_PENGELOLAAN\\_SAMPAH\\_PERKOTAAN\\_BE/wNOvEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/MENCAPAI_PENGELOLAAN_SAMPAH_PERKOTAAN_BE/wNOvEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

Parameswari, P. (2016). Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v1i2.431>

Pasolong, H. (2020). *Metode penelitian administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.

Purusottama, A., Budihardjo, A., Elfriede, D. P., Ramadhanti, F., Honggo, H., Setiawati, I. B., Istijanto, Kusmulyono, M. S., Prasetya, P., Rachman, R. A., Agustiawan, S., Cunha, W. da, & Hartono, Y. (2022). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini: Capita Selecta Seri 1 2021-2022*. Prasetya Mulya Publishing.

Purwanti, I. (2021). KONSEP DAN IMPLEMENTASI EKONOMI SIRKULAR DALAM PROGRAM BANK SAMPAH STUDI KASUS: KEBERLANJUTAN BANK SAMPAH TANJUNG. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), Article 1.

Rahman, R. H. (2022). *PENERAPAN ATURAN ZONA INTEGRITAS SEBAGAI BENTUK REFORMASI BIROKRASI PADA PELAYANAN HAJI DAN UMROH DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO* [Masters, UNIVERSITAS LAMPUNG]. <http://digilib.unila.ac.id/63486/>

Rangkuti, A. F., & Susilawati, S. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Pantai Sibolga. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 176-179.

Sahar, R. A., Rauf, A., & Hamsiah, H. (2020). Pemetaan Pola Sebaran Sampah Berdasarkan Jenis Di Wilayah Pesisir Pantai Kuri Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Journal Of Indonesian Tropical Fisheries (Joint-Fish) : Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v3i1.68>

Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Grasindo.

Sari, M. R. (2016). *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, dan Opini Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan*.

- Schuyler, Q., Hardesty, B. D., Lawson, T., Opie, K., & Wilcox, C. (2018). Economic incentives reduce plastic inputs to the ocean. *Marine Policy*, 96, 250–255. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.02.009>
- Shelawati, R. (2022). *ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS (STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)* [Masters, Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/63406/>
- Steiss, A. W. (Ed.). (2003). *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781482275865>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metodologi kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko, -. (1998). Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jsp.11158>
- Sulistio, F. (2020). *PERAN KOMUNITAS NGEJAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM LITERASI MELALUI TAMAN BACA MASYARAKAT AIUEO (Studi di Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut)* [Sarjana, Universitas Siliwangi]. <http://repositori.unsil.ac.id/5635/>
- Tamam, B. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih Di Pulau Gili Ketapang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165853>
- Terang, N. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Sampah Menggunakan Metode Open Dumping Dan Sanitary Landfill Di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Velenturf, A. P. M., Archer, S. A., Gomes, H. I., Christgen, B., Lag-Brotons, A. J., & Purnell, P. (2019). Circular economy and the matter of integrated resources. *The Science of the Total Environment*, 689, 963–969. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.449>

Winters, M. S., Karim, A. G., & Martawardaya, B. (2014). Public Service Provision under Conditions of Insufficient Citizen Demand: Insights from the Urban Sanitation Sector in Indonesia. *World Development*, 60, 31–42. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.017>

Wulandari, A. (2017, July 4). *IMPLEMENTASI STRATEGI BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) LAMPUNG DALAM MENGELOLA TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH TAHUN 2016* [Skripsi]. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. <http://digilib.unila.ac.id/27532/>

Yabes D.A.H. Tambun, Sri Maryati, Husna Tiara Putri (2019) - Intervensi Permasalahan Infrastruktur Persampahan Teluk Kota Bandar Lampung: Penyediaan Infrastruktur Persampahan di DAS Kuala, DAS Belau, DAS Lunik, dan DAS Sukamaju

Zaenafi Ariani, S., Nurjannah, S., SH, M., & Syawaluddin, S. (2022). *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma dan Implementasi)*. Deepublish.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang – Undang No 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038